

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Keruntuhan ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia tidak lepas dari adanya praktek bisnis yang kurang adil dalam masyarakat. Dalam dunia bisnis manajemen dan kegiatan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Pemisahan ini dapat menimbulkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana pada perusahaan sarat keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada.

Ada beberapa prinsip yang dibutuhkan untuk membangun suatu budaya bisnis yang sehat yaitu : transparansi, keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab. Keempat prinsip ini kemudian dikenal sebagai prinsip terwujudnya suatu *A Good Corporate Governance* (Selanjutnya disingkat dengan *GCG*). *GCG* adalah sebuah sistem guna mengendalikan dan mengarahkan perusahaan meliputi semua jaringan hubungan formal-informal sektor korporasi serta konsekuensinya bagi masyarakat umum. Kalangan bisnis umumnya menafsirkan *GCG* sebatas bagaimana perusahaan meningkatkan laba, menempatkan manajer dan karyawan serta mencapai target usaha bahkan lebih sempit lagi sebagai masalah pembagian kekuasaan.

Sementara para pejabat dan wakil rakyat umumnya menafsirkan *GCG* sebagai suatu hal yang harus dimiliki perusahaan agar bermanfaat bagi pemerintah atau

lingkungan sosialnya. Namun secara umum *GCG* adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. *Good Corporate Governance* memiliki empat dasar pemikiran, yang meliputi :

1. Keadilan (*fairness*)

Adanya kejelasan hak-hak kepemilikan bagi pemodal serta hukum dan penegakan peraturan-peraturan untuk melindungi hak-hak para pemegang saham minoritas.

2. Transparansi (*transparency*)

Perusahaan harus secara reguler dan tepat waktu menyediakan informasi yang cukup dan akurat kepada para *stakeholder*.

3. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara direksi, pemegang saham, dan auditor. Keseimbangan peran antara manajemen, komisaris, dan auditor sangat penting dalam menciptakan pengelolaan yang baik pada suatu perusahaan. Termasuk didalamnya adalah pembatasan kekuasaan antara manajer perusahaan yang bertanggungjawab dalam kegiatan operasional sehari-hari dengan pemegang saham yang dalam hal ini diwakili oleh dewan komisaris.

4. Responsibilitas (*responsibility*)

Perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk mengetahui hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen harus berupaya memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi perusahaannya sesuai dengan bidang industrinya masing-masing.

Isu *GCG* kini begitu mencuat ke permukaan, Karena diharapkan akan mendatangkan berbagai keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan ini antara lain mengurangi resiko, membantu menjamin kepatuhan akan peraturan yang ada, meningkatkan kepemimpinan didalam perusahaan, memacu kinerja, membantu perusahaan dalam upaya *go public*, meningkatkan kepercayaan para pemegang saham serta mengungkapkan akuntabilitas sosial secara jelas.

Upaya melakukan *good corporate governance* dapat dilakukan jika masing – masing pihak yang berkepentingan dalam perusahaan menyadari perannya untuk mewujudkan *good corporate governance*. Berikut setidaknya bentuk – bentuk peran yang dapat di ambil oleh para manajer, akuntan manajemen, dan auditor internal dalam mendukung terwujudnya *GCG* di perusahaan. Para manajer perusahaan dapat berperan secara efektif terhadap *corporate governance* dengan melakukan tindakan – tindakan, antara lain :

1. Mengidentifikasi secara layak, mengevaluasi, dan mengelola resiko dan peluang ;
2. Menindaklanjuti kebijakan perusahaan dan menjelaskan tujuan perusahaan secara lengkap;

3. Menaati standar – standar etika; dan
4. Memandang dewan direksi perusahaan sebagai ahli dan kewenangan legalnya diakui.

Auditor internal bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Auditor internal wajib memberikan informasi yang berharga bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.

Auditor internal di perusahaan dapat berperan dalam :

- I. Membantu dewan dalam menilai resiko utama dan memberi nasihat pada pihak manajemen;
- II. Mengevaluasi sistem internal kontrol dan bertanggung jawab kepada komite audit;
- III. Menelaah peraturan *corporate governance* minimal setahun sekali.
(Presiden CIMA (Chartered Institute of Management Accountant) : David Melvill).

Akuntan memegang peranan penting terhadap terlaksananya *GCG* di perusahaan terutama yang berprofesi sebagai akuntan internal (akuntan manajemen). Akuntan kemudian dituntut untuk mempunyai wawasan yang luas terhadap perusahaan. Walaupun *GCG* mempunyai banyak keuntungan, banyak perusahaan di Indonesia yang tidak mengindahkan *GCG*. Indikasi ini menjadi kuat dengan banyaknya perusahaan yang berguguran selama periode puncak krisis

moneter. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan kerangka paling penting bagi perundang-undangan yang ada mengenai *corporate governance* di Indonesia. Kunci utama dibutuhkannya *good governance* adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui mekanisme supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan juga sebagai upaya untuk memperkuat dan mempertegas pertanggungjawaban pimpinan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

Setiap organisasi memerlukan pengendalian internal yang baik agar tujuan organisasi dan kepentingan-kepentingan stakeholder dapat tercapai secara optimal. Demi kepentingan mereka maka perusahaan perlu memastikan kepada pihak penyandang dana eksternal bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin dan memastikan bahwa manajemen melakukan tindakan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan.

Kepastian seperti itu diberikan oleh sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang tak lepas dari peranan auditor internal. Melihat kenyataan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*”.

1.1 Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah audit internal telah dilaksanakan dengan efektif pada PT. PINDAD (Persero) di kota Bandung
2. Apakah pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan efektif pada PT. PINDAD (Persero) di kota Bandung
3. Seberapa besar pengaruh audit internal terhadap efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. PINDAD (Persero) di kota Bandung

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan peranan audit internal terhadap perwujudan *Good Corporate Governance* yang akan digunakan oleh penulis sebagai bahan penyusun skripsi dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menilai apakah audit internal telah dilaksanakan dengan efektif pada PT. PINDAD (Persero) di kota Bandung
2. Mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan efektif pada PT. PINDAD (Persero) di kota Bandung
3. Seberapa besar pengaruh audit internal berperan terhadap efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. PINDAD (Persero) di kota Bandung

1.3 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Menambah pengetahuan tentang pengendalian internal dalam perusahaan, beserta penerapan dari teori yang telah penulis terima selama kuliah secara nyata.
- b. Memenuhi persyaratan mengikuti ujian sarjana lengkap dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi Perusahaan

- a. Memberikan masukan dan diharapkan dapat membantu dalam penerapan prinsip-prinsip *Corporate Governance* di PT. PINDAD (Persero)
- b. Memberikan kontribusi teori dan kontribusi praktek, terutama yang berkaitan dengan peranan audit internal terhadap efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

3. Bagi Pembaca

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang dapat menambah informasi dan referensi ilmiah bagi pembaca yang sedang melakukan penelitian mengenai topik yang sama dan dapat menjadi sumber untuk penelitian lanjutan mengenai *GCG*.

- b. Dapat memberikan informasi mengenai pengaruh audit internal terhadap efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

1.4 Kerangka Pemikiran

Tuntutan masyarakat dewasa ini terhadap tata kelola perusahaan yang sehat semakin tinggi, sehingga semakin selektif dalam pemilihan perusahaan. Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik, menurut *United National Development Program* (UNDP) yang dikutip dari **Mardiasmo** (2002;17), mendefinisikan *governance* sebagai berikut :

“The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”

Dari pernyataan diatas UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan Negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategic formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan diidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implikasi kebijakan.

Karakteristik *good corporate governance* menurut UNDP, meliputi :

1. *Participation* ;
2. *Rule of law* ;
3. *Transparency* ;
4. *Responsiveness* ;
5. *Consensus orientation* ;
6. *Equality* ;
7. *Efficiency and effectiveness* ;
8. *Accountability* ;
9. *Strategic vision* ;
10. *Independency*.

Forum for corporate governance (FCGI) yang dikutip dari **Tjager** (2003;26) mendefinisikan *corporate governance* sebagai :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan kata lain sistem yang mengendalikan perusahaan”.

Good corporate governance (GCG) bukan hal baru di Indonesia. Kalau akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan, itu disebabkan karena bangkitnya kesadaran *corporate* secara nasional untuk ikut memikul tanggungjawab dalam rangka memulihkan kondisi perekonomian Indonesia. Bangkitnya kesadaran itu sendiri terjadi setelah hasil evaluasi maupun kajian dari berbagai aspek bisnis menunjukkan bahwa krisis bukan semata-mata dari efek domino (krisis Asia). Melainkan dampak bisnis yang dilakukan perusahaan di Indonesia yang tidak mengindahkan *good corporate governance*.

Corporate governance merupakan sistem yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang berperan dan terkait dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* seperti yang

dikutip oleh majalah **manajemen manusia edisi Juli 2000**. *GCG* adalah suatu sistem bagaimana suatu perusahaan dijalankan dan diawasi. Struktur *corporate governance* menjelaskan pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perusahaan, seperti direksi, dewan komisaris, manajer, pemegang saham, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan, serta mengeluarkan peraturan dan prosedur pengambilan keputusan bagi kepentingan perusahaan.

Menurut **David Melvill**, presiden *Chartered Institute of Management Accountant*, ada beberapa keuntungan dari penerapan *GCG* antara lain mengurangi risiko, membantu menjamin kepatuhan dengan peraturan yang ada, meningkatkan kepemimpinan di dalam perusahaan, memacu kinerja, membantu perusahaan dalam upaya *go public*, meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan akuntabilitas sosial yang akan terungkap secara jelas. Ide pelaksanaan *GCG* di Indonesia merupakan pangkal tolak bagi perubahan budaya kerja pada perusahaan. Dengan *GCG* diharapkan perusahaan dan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan kaidah praktik yang sehat di segala bidang. Indonesia merupakan Negara ke-empat yang melaksanakan *GCG* di kawasan Asia setelah Malaysia, Hongkong dan Korea Selatan.

Dalam mewujudkan dan meningkatkan *good corporate governance* memerlukan akuntan perusahaan, baik peran dari akuntan manajemen maupun auditor internal. Auditor internal bertugas mengevaluasi sistem akuntansi serta menilai seberapa jauh kebijakan dan program kinerja manajemen yang diperlukan. Auditor internal merupakan salah satu profesi yang menunjang peningkatan *good*

corporate governance, saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan pengelolaan perusahaan secara sehat.

Menurut OECD (*Organization for Economic and Development*), ada lima prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. *The Rights of Shareholders.*
2. *The Equitable Treatment of Shareholders.*
3. *The Role of Stakeholders.*
4. *Disclosure and Transparency.*
5. *The Responsibility of The Board.*

Dalam mewujudkan dan meningkatkan *Good Corporate Governance* memerlukan peran akuntan perusahaan, baik peran dari akuntan manajemen maupun auditor internal. Auditor internal bertugas mengevaluasi sistem akuntansi serta menilai seberapa jauh kebijakan dan program kinerja manajemen yang diperlukan. Internal auditing merupakan salah satu profesi yang menunjang peningkatan *Good Corporate Governance*, saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan pengelolaan perusahaan secara sehat.

Definisi audit internal yang disetujui oleh **IIA Board of Directors** pada bulan juni 1999. Definisi baru audit internal tidak hanya merefleksikan perubahan yang terjadi dalam profesi, definisi tersebut juga mengarahkan auditor internal menuju peran yang lebih luas dan mampu berpengaruh pada masa yang akan datang, dikutip dari **Tunggal (2000:3)** definisi baru tersebut adalah :

“Internal audit is an independent, objective assurance and consulting activities designed to add value and improve an organization’s operations. It help an organization accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”.

Definisi diatas dapat diartikan bahwa audit internal adalah aktivitas yang independent, objektif, dan aktivitas pemberi keyakinan yang memadai dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan organisasi. Audit internal juga dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektivan manajemen resiko, pengendalian dan proses pengarturan dan pengelolaan organisasi.

Agar terciptanya Audit Internal (pemeriksaan intern) yang baik, maka perlu dipenuhi suatu kriteria atau standar. Salah satu standar yang digunakan adalah *Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* yang dikeluarkan oleh ***The Institute of Internal Auditors*** sebagai berikut :

1. *Independence* (Independensi)

Independensi harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya dan memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*). Audit Internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksanya.

2. *Professional Proficiency* (Kemampuan Profesional)

Audit Internal harus dilakukan dengan keahlian dan ketelitian profesional.

3. *Scope of Work* (Lingkup Kerja)

Lingkup pekerjaan auditor internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

4. *Performance of Audit Work* (Pelaksanaan Kegiatan Audit)

Kegiatan audit harus meliputi perencanaan audit (*Audit Program*), pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil (*Reporting*), dan menindaklanjuti (*Following Up*).

5. *Management of The Internal Auditing Departement* (Manajemen Bagian Audit Internal)

Pimpinan Audit Internal harus mengelola bagian Audit Internal secara tepat.

Upaya melakukan *GCG* dapat dilakukan jika masing-masing pihak dalam perusahaan menyadari perannya untuk mewujudkan *GCG*. Secara khusus audit internal dapat berperan dalam:

1. Membantu komite audit dalam menilai resiko dan memberi nasihat pada pihak manajemen.
2. Mengevaluasi sistem pengendalian internal dan bertanggungjawab kepada komite audit.
3. Menelaah peraturan *corporate governance* minimal setahun sekali.

Perwujudan *GCG* ternyata sangat membutuhkan peran akuntan perusahaan. Akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan melibatkan pekerjaan sebagai berikut:

1. Kontroller yaitu pejabat tertinggi sebuah perusahaan dengan tugas utama mengawasi semua kegiatan.
2. bendahara/*treasurer* yang memutuskan bagaimana cara laporan harus direka dan bagaimana cara menyampaikan informasi tersebut kepada pengambil keputusan.
3. Akuntan biaya yang menyetujui, mengolah, dan melaporkan informasi mengenai pembiayaan produk.
4. Audit internal yang meneliti dan mengevaluasi bekerjanya sistem akuntansi di samping menilai seberapa jauh kebijakan dan program kerja manajemen di jalankan.
5. Spesialisasi pajak bertanggungjawab membuat SPT dan memberikan saran kepada manajemen tentang konsekuensi pajak dari berbagai tindakan yang dipertimbangkan manajemen.
6. Analisis sistem informasi yang merancang sistem informasi akuntansi secara komputerisasi.

Perwujudan *Good Corporate Governance* yang efektif menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan pengendalian perusahaan sehingga dapat ditekan seminimal mungkin peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang masing-masing organ perusahaan.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut :



Gambar 1.1 : Hubungan Antara Pengaruh Audit Internal Terhadap Efektivitas Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

$H_0 : \rho = 0$, artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara pengaruh kinerja audit internal terhadap efektivitas pelaksanaan *good corporate governance*.

$H_a : \rho \neq 0$, artinya ada hubungan yang signifikan antara pengaruh kinerja audit internal terhadap efektivitas pelaksanaan *good corporate governance*.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode pengumpulan dan penelitian data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analitis dengan pendekatan studi kasus, dimana data yang diperoleh selama penelitian ini akan diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari. Menurut **Nazir (1999;63)**, metode deskriptif adalah metode dalam penelitian sekelompok manusia, suatu obyek suatu kondisi, suatu sistem penilaian ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, dimana tujuannya adalah untuk membuat gambaran atau lukisan

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode ini bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Untuk keperluan pengujian diperlukan serangkaian langkah-langkah yang akan dimulai dengan teknik pengumpulan data dan rancangan pengujian hipotesis dengan cara pengisian kuesioner atau daftar pertanyaan terstruktur dari masing-masing bagian yang terkait.

Untuk mendapatkan data primer, teknik penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan pimpinan, staf dan karyawan tertentu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan. Selain data primer, sumber data sekunder juga diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Objek yang dijadikan lokasi penelitian untuk mendapatkan data adalah PT. PINDAD (Persero) yang berlokasi di **PT. PINDAD (Persero) Bandung**. Penelitian dilakukan dalam waktu kurang lebih **2 bulan** yaitu dimulai bulan **Juli 2008** sampai dengan **Agustus 2008**.